

PAPUA BARAT


1,3 Milyar Data Registrasi SIM Card Masyarakat Tanah Air Bocor

Updates. - PUBLIKPAPUABARAT.COM

Sep 1, 2022 - 20:06

ARD (PHONE NUMBER) REGISTRATION 1,3 BILLION
at 31, 2022 at 01:39 PM

9 hours ago (This post was last modified 9 hours ago by @junta.)



KOMINFO
Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia

Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia has issued a regulation which re card users to register their phone number with a valid national identification card (KTP) and family card (KK). The registrati October 31, 2017. Failure to do so by the end of the registration deadline would cause temporary suspension of service number

File Information

Compressed.....	18 GB
Uncompressed.....	87 GB
Total.....	1,304,401,300
Breach date.....	August, 2022
Format.....	CSV
Compromised data.....	NIK (National ID CARD Number), Phone Number, Telco Providers, Registration Date
Country.....	Indonesia
File sharing.....	GoFile.io

SAMPLE

JAKARTA - Setelah rentetan kebocoran yang hampir tiap hari terjadi pada bulan Agustus 2022 pada beberapa Perusahaan baik negara maupun swasta seperti PLN, Indihome, maupun data Kampus, data Sekolah, data penduduk, database 21 ribu perusahaan, dan lainnya. Kali ini ada 1,3 Miliar data registrasi sim card masyarakat tanah air yang bocor.

Dalam keterangannya pada Rabu siang (01/09/2022), pakar keamanan siber

Pratama Persadha menjelaskan bahwa kebocoran tersebut diunggah hari Selasa siang 31 Agustus oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas 'Bjorka' yang juga membocorkan data riwayat pelanggan Indihome beberapa waktu lalu. Pengunggah tersebut juga memberikan sample data sebanyak 1,5 juta data.



NIK	Nomor Ponsel	Operator Seluler	Tanggal Registrasi
1597788	0815977888	IndiHome	2023-08-31
1597789	0815977889	IndiHome	2023-08-31
1597790	0815977890	IndiHome	2023-08-31
1597791	0815977891	IndiHome	2023-08-31
1597792	0815977892	IndiHome	2023-08-31
1597793	0815977893	IndiHome	2023-08-31
1597794	0815977894	IndiHome	2023-08-31
1597795	0815977895	IndiHome	2023-08-31
1597796	0815977896	IndiHome	2023-08-31
1597797	0815977897	IndiHome	2023-08-31
1597798	0815977898	IndiHome	2023-08-31
1597799	0815977899	IndiHome	2023-08-31
1597800	0815978000	IndiHome	2023-08-31
1597801	0815978001	IndiHome	2023-08-31
1597802	0815978002	IndiHome	2023-08-31
1597803	0815978003	IndiHome	2023-08-31
1597804	0815978004	IndiHome	2023-08-31
1597805	0815978005	IndiHome	2023-08-31
1597806	0815978006	IndiHome	2023-08-31
1597807	0815978007	IndiHome	2023-08-31
1597808	0815978008	IndiHome	2023-08-31
1597809	0815978009	IndiHome	2023-08-31
1597810	0815978010	IndiHome	2023-08-31
1597811	0815978011	IndiHome	2023-08-31
1597812	0815978012	IndiHome	2023-08-31
1597813	0815978013	IndiHome	2023-08-31
1597814	0815978014	IndiHome	2023-08-31
1597815	0815978015	IndiHome	2023-08-31
1597816	0815978016	IndiHome	2023-08-31
1597817	0815978017	IndiHome	2023-08-31
1597818	0815978018	IndiHome	2023-08-31
1597819	0815978019	IndiHome	2023-08-31
1597820	0815978020	IndiHome	2023-08-31
1597821	0815978021	IndiHome	2023-08-31
1597822	0815978022	IndiHome	2023-08-31
1597823	0815978023	IndiHome	2023-08-31
1597824	0815978024	IndiHome	2023-08-31
1597825	0815978025	IndiHome	2023-08-31
1597826	0815978026	IndiHome	2023-08-31
1597827	0815978027	IndiHome	2023-08-31
1597828	0815978028	IndiHome	2023-08-31
1597829	0815978029	IndiHome	2023-08-31
1597830	0815978030	IndiHome	2023-08-31

"Jika diperiksa, sample data yang diberikan tersebut memuat sebanyak 1.597.830 baris berisi data registrasi sim card milik masyarakat Indonesia. isinya berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor ponsel, nama provider, dan tanggal registrasi. Penjual juga mencantumkan harga sebesar 50.000 dollar atau sekitar 700 juta rupiah dan transaksi hanya menggunakan mata uang kripto",

terang chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini.

Pratama mengemukakan, data pastinya berjumlah 1.304.401.300 baris dengan total ukuran mencapai 87 GB. Ketika sampel data dicek secara acak dengan melakukan panggilan beberapa nomor, maka nomor tersebut masih aktif semuanya. Berarti dari 1,5 juta sampel data yang diberikan merupakan data yang valid. Untuk mengecek apakah data kita termasuk kedalam 1,5 juta sampel data yang dibagikan atau tidak, bisa menggunakan situs www.periksadata.com dengan memasukkan nomor ponsel.

"Sampai saat ini sumber datanya masih belum jelas. Dari pihak Kominfo, Dukcapil, maupun Operator seluler juga telah membantah bahwa datanya dari server mereka. Masalahnya saat ini hanya mereka (Kominfo, Dukcapil, Operator seluler) yang memiliki dan menyimpan data ini. Kalau Operator Seluler sepertinya tidak mungkin, karena sample datanya lintas operator. Jalan terbaik harus dilakukan audit dan investigasi digital forensic untuk memastikan kebocoran data ini dari mana. Sangat mustahil jika data yang bocor ini tidak ada yang mempunyainya.

Namun kalau kita melihat sample data yang datanya dari semua operator maka seharusnya cuma Kominfo yang bisa mempunya data ini, Tapi kita perlu pastikan dulu." imbuhnya.

Ditambahkan Pratama bahwa jika data ini benar, artinya semua nomor ponsel di Indonesia sudah bocor baik itu sim card prabayar maupun pascabayar. Dan sangat rawan sekali data ini jika digabungkan dengan data - data kebocoran yang lain, bisa menjadi data profile lengkap yang bisa dijadikan data dasar dalam melakukan tindak kejahatan penipuan atau kriminal yang lain.

"Dengan kondisi di Indonesia yang belum ada UU Perlindungan Data Pribadi, sehingga tidak ada upaya memaksa dari negara kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk bisa mengamankan data dan sistem yang mereka kelola dengan maksimal atau dengan standar tertentu. Akibatnya banyak terjadi kebocoran data, namun tidak ada yang bertanggungjawab, semua merasa menjadi korban. Padahal soal ancaman peretasan ini sudah diketahui luas, seharusnya PSE melakukan pengamanan maksimal, misalnya dengan menggunakan enkripsi/penyandian untuk data pribadi masyarakat. Minimal melakukan pengamanan maksimal demi nama baik lembaga atau perusahaan." Kata pria asal Cepu, Jawa Tengah ini.

Pratama menjelaskan bahwa Di Uni Eropa denda bisa mencapai 20 juta euro untuk setiap kasus penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi masyarakat. BSSN juga harus masuk lebih dalam pada berbagai kasus kebocoran data di tanah air, minimal menjelaskan ke publik bagaimana dan apa saja yang dilakukan berbagai lembaga publik yang mengalami kebocoran data akibat peretasan.

"Karena selama ini selain tidak ada sanksi yang berat, karena belum adanya UU PDP, pasca kebocoran data tidak jelas apakah lembaga bersangkutan sudah melakukan perbaikan atau belum. Jadi publik perlu tahu, dan bila ini terus terjadi maka dunia internasional akan meningkat ketidakpercayaan pada Indonesia.

Padahal Indonesia kini “pemimpin” G20, jangan sampai ajang G20 nanti dihiasi kebocoran data,” terangnya.

Narasumber

Dr Pratama Persadha

Chairman CISSReC